

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RANHIR RENJA)
TAHUN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah , yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana kerja perangkat daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja Perangkat daerah menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja Perangkat daerah merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan, Forum Perangkat Daerah dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah ini antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6861) ;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pmutakhiran Verifikasi;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4) ;

- q. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3).
- r. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penyusunan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rencana Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu pada periode renstra 2021-2026 dan perkiraan pelaksanaan DPA -SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan (tahun 2024).

Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 :
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KO DE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah tahun n-2 th. 2023)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2 tahun 2023)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Traget Renstra (%)
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1.05 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	B			B	B
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan :							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	2	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	3	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	13 laporan	13 laporan	100 %
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 or/bulan	72 or/ bulan	969 or/bulan	969 or/bulan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 dokumen	1 laporan	1 dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	12 paket	12 paket	100 %
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	0	0	

	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	11 laporan	7 laporan	7 laporan	100 %
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	100 %	100%	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	100 %	100%	100%	
Sub Kegiatan :							
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 unit	33 unit	40 unit	40 unit	100 %
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100 %
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	17 unit	17 unit	100 %
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	60 %	60,68 %	72 %	72 %	100 %
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	278 kasus	288 kasus	193 kasus	10%
		Angka Penyakit masyarakat	45 kasus	45 kasus	44 kasus	44 kasus	2,2 %
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	1980 orang	3097 Orang	Orang	3220 orang	

Sub Kegiatan :							
1.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	130 kasus	130 kasus	48 laporan	48 laporan	100 %
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa	Jumlah kasus gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa yang dilakukan penindakan	2 kasus	2 kasus	12 laporan	12 laporan	100 %
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	100 %

Berdasarkan tabel di atas capaian program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja persentase perda perkara yang ditegakkan target 60 % tercapai 60,68 % dengan capaian kinerja 101 %. Sedangkan untuk capaian masing-masing indikator kegiatan adalah :

1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota dengan indikator kinerja :

- Angka gangguan trantibum 193 kasus di mana pada tahun 2022 jumlah kasus gangguan trantibum 278 kasus yang artinya ada penurunan kasus gangguan trantibum di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10 %.
- Angka penyakit masyarakat dari target 45 kasus realisasi 45 kasus di mana angka penyakit masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 46 kasus artinya hanya terjadi penurunan kasus sebesar 2,2 %.
- Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum tahun 2023 adalah sebanyak 3097 orang dari target 1980 orang. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 2200 orang dari target 1910 orang. Anggota satlinmas sudah ada di 154 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

1.2 Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota dengan indikator persentase penanganan pelanggaran perda dan perkara dengan target 100 % realisasi 100 %. Artinya setiap adanya pelanggaran perda dan perkara selalu dapat ditangani baik secara yustisi maupun non yustisi.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja nilai SAKIP OPD B, pada tahun 2023 realisasi Nilai SAKIP Satpol PP adalah B. Sedangkan pada tahun 2022 nilai SAKIP Satpol PP adalah CC. Artinya pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja mengalami peningkatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah :

1. Terlaksananya evaluasi kinerja secara berkala untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sesuai target yang ditentukan.

2. Terlaksananya koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
3. Terlaksananya Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Terlaksananya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, patroli, pembinaan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan
5. Kerjasama masyarakat dalam menjaga trantibum semakin meningkat
6. Terlaksananya Penanganan/ penindakan terhadap pelanggaran gangguan trantibum.

Dengan terlaksananya program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sangat berdampak pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, penurunan pelanggaran perda dan perkara sehingga masyarakat menjadi lebih aman, tentram dan kondusif yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan penindakan atas gangguan trantibum melalui kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penegakan pelanggaran perda terkait pajak dan retribusi daerah juga sangat berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi pada Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilaksanakan :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Penambahan anggaran untuk memenuhi target capaian mutu layanan SPM bidang Ketentraman dan ketertiban umum, seperti :
 - a. diklat dasar untuk ASN Satpol PP, diklat PPNS, dan diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN Satpol PP sesuai kebutuhan jumlah personil Satpol PP.
 - b. Pemenuhan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional, pembangunan gedung sekretariat PPNS, pembangunan ruang penyimpanan barang bukti, pengadaan sarana pendukung seperti senter, pakaian huru hara.
 - c. Anggaran Penyusunan SOP Satpol PP
 - d. Anggaran penyusunan Standar pelayanan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara
 - e. Anggaran untuk warga negara yang memperoleh kerugian material (kerusakan akibat penegakan perda perkara, baik rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)

- f. Anggaran untuk warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda perkara dan ditindaklanjuti dengan di bawa ke rumah sakit apabila terkena cedera sedang/ berat).
3. Koordinasi dari dinas terkait terhadap pelanggaran perda yang yang diampu perlu ditingkatkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Kabupaten Lombok Tengah pada RPJMD tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (BERSATU JAYA) selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka diperlukan suasana yang aman, tentram dan kondusif di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Setiap gangguan trantibum yang dilaporkan secara langsung oleh masyarakat selalu ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan dengan melakukan tindakan baik secara yustisi maupun non yustisi sehingga persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan mencapai 100 %.

2. Persentase perda dan perkara yang ditegakkan.

Untuk mencapai indikator kinerja kunci persentase perda dan perkara yang ditegakkan telah dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap perda dan perkara yang memuat sanksi yang prioritas akan ditegakkan pada tahun 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan OPD pengampu perda yang memuat sanksi. Dari hasil evaluasi dan koordinasi dengan OPD terkait ditetapkan 23 perda perkara yang memuat sanksi yang akan ditegakkan namun karena adanya perda Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beberapa perda yang rencana akan ditegakkan sudah termuat di dalam perda ini. Sehingga jumlah perda perkara yang memuat sanksi yang akan ditegakkan pada tahun 2024 sebanyak 13 perda perkara.

Untuk tahun 2024 target capaian persentase perda dan perkara yang ditegakkan adalah 72 % sedangkan untuk tahun 2025 targetnya sebesar 86 %.

Agar dapat memberikan rasa aman, tenang dan kondusif di tengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi pemerintah daerah diperlukan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :

1. Melaksanakan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan deteksi dini cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan, pengamanan.
2. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran perda dan perkara serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara.
4. Memfasilitasi pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online dengan adanya inovasi SIGAP (mengatasi segera pelanggaran perda dan perkara) melalui telpon, sms, whatsapp, facebook dan media sosial lainnya yang dimiliki oleh Satpol PP.
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
6. Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten dan kecamatan serta melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas.
8. Pemenuhan mutu layanan SPM bidang trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
9. Tugas perbantuan dalam pelaksanaan program bidang penegakan hukum DBHCHT, yaitu kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan di bidang cukai dan operasi pemberantasan BKCHT ilegal di Kabupaten Lombok Tengah dengan kerjasama Kantor Bea Cukai Mataram.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan rakyat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. Untuk Satuan Polisi pamong Praja jenis layanan dasar yang harus dipenuhi adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan mutu layanan :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. Gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c. Perlengkapan operasional) ;
2. Standar operasional prosedur Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/ SDM);
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada;
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat pelanggaran perda perkara, rusak ringan, rusak sedang rusak berat);
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda perkara dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang atau berat.

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pencapaian								
Penerima Layanan Dasar					Mutu Minimal Layanan Dasar			
No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Ket
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan perda/perkada	30 orang	2023	1. Standar sarana prasarana Satpol PP 2. Standar operasional prosedur Satpol PP; 3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/ SDM); 4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada; 5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi 6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	89 14 434 1 0 0	2023	

Realisasi SPM Pelayanan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal selanjutnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	30	0	Orang	100

Target SPM Pelayanan Pemeliharaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023 dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada adalah 30 orang dengan realisasinya 0 orang. Sedangkan Mutu minimal layanan dasar dengan indikator kinerja :

1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material
2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan
3. Standar operasional prosedur Satpol PP
4. Standar sarana prasarana Satpol PP
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada.

Untuk indikator Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material dan Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan tidak dianggarkan karena Penegakan perda/perkada telah dilaksanakan sesuai SOP Satpol PP sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak kerugian baik materi maupun pengobatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dasar pelaksanaan tugas dalam penegakan perda/perkada terdiri dari 14 SOP,antara lain :

1. SOP Penegakan Peraturan Daerah Non Yustisi

2. SOP Penegakan Peraturan Daerah Yustisi
3. SOP Penegakan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
4. SOP Penanganan Kerusuhan Massa
5. SOP Penanganan Unjuk Rasa
6. SOP Pengawalan
7. SOP Pengamanan Aset Daerah
8. SOP Pengamanan Lokasi Kunjungan
9. SOP Pengamanan Upacara dan Acara
10. SOP Patroli
11. SOP Pelaksanaan Pembinaan
12. SOP Pelaksanaan Penyuluhan
13. SOP Pelaksanaan Deteksi Dini
14. SOP Pelaksanaan Cegah Dini

Dalam pelaksanaan tugas operasional Satuan polisi Pamong praja Kabupaten Lombok Tengah memiliki sarana prasarana berupa 1 gedung kantor, 2 buah truk, 5 buah pick up, 1 buah minibus dan 33 buah sepeda motor, 31 buah PHH, 15 buah Handy Talk, 1 buah mega phone.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah mengadakan kegiatan pembinaan jasmani guna memberikan pembekalan kepada Anggota untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelatihan baris-berbaris. Kegiatan ini diikuti oleh 434 orang anggota.

Analisis kinerja pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ditampilkan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1.	Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	-		18	17	16	26	18	17	16	15	
2	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	-		10 %	10 %	10 %	9,6 %	10,06 %	10 %	10 %	10 %	
3	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	-		32 %	33 %	34 %	32,4 %	32,12 %	33 %	34 %	35 %	
4	Persentase perda perkara yang ditegakkan		Persentase perda perkara yang ditegakkan	60 %	72 %	86 %	50 %	60,87 %	72 %	86 %	%	
5	Angka gangguan trantibum	-		288 kasus	288 kasus	288 kasus	278 kasus	193 kasus	173 kasus	153 kasus	143 kasus	
6	Angka Penyakit masyarakat			45 kasus	44 kasus	43 kasus	46 kasus	45 kasus	44 kasus	43 kasus	42 kasus	
7	Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum			1980 orang	2030 orang	2120 orang	2200 orang	3097 orang	3097 orang	3097 orang	3097 orang	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok, antara lain :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

1. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Satpol PP yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang melaksanakan tugas, antara lain melaksanakan patroli, pengamanan dan pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Bidang Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan cegah dini dan deteksi dini dan kegiatan pemberdayaan linmas.
4. Bidang Penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan, penanganan pengaduan masyarakat, penyelidikan dan penanganan pelanggaran perda dan perkara.

Agar dapat memberikan rasa aman, tentram dan kondusif di tengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi pemerintah daerah telah dilaksanakan beberapa kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya :

1. Melaksanakan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan deteksi dini cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengawalan, pengamanan.
2. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran perda dan perkara serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara.

4. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
5. Koordinasi untuk Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten dan kecamatan serta melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas.
7. Tugas perbantuan dalam pelaksanaan program bidang penegakan hukum DBHCHT, yaitu kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan di bidang cukai dan operasi pemberantasan BKCHT ilegal di Kabupaten Lombok Tengah dengan kerjasama Kantor Bea Cukai Mataram.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada beberapa isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan tersebut dapat berupa internal maupun eksternal serta rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya beberapa mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum, seperti :
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Masih kurangnya kemampuan (kualitas) dari personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Tidak dianggarkannya layanan dasar SPM, yaitu layanan pengobatan dan layanan penggantian kerugian materi akibat penegakan hukum perda dan perkara.
2. Terbatasnya jumlah personil (kuantitas) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah;

3. Belum maksimalnya peran PPNS karena terkendalanya jumlah PPNS dan keberadaan kesekretariatan;
4. Jangkauan wilayah patroli masih hanya di seputaran kota Praya dan kawasan strategis saja sehingga harus diperluas lagi di semua kecamatan yang ada di kabupaten Lombok Tengah.
5. Perlu ditingkatkannya sinergi/kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Semakin banyaknya event-event daerah yang harus dilakukan pengamanan dan pengawalan.
7. Belum terbentuknya Satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
8. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum serta ketaatan terhadap Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Masih minimnya dukungan anggaran guna menunjang Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Minimnya dukungan pendampingan hukum yudikatif.

2.3.3. Dampak permasalahan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program

Program unggulan kepala daerah yang telah diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas berdasarkan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 adalah “Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum” yang menjadi program pada renstra Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dan disesuaikan dengan program strategis provinsi NTB “ Meraih masyarakat madani (bahagia)”. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat terlaksana dengan di dukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan serta aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lombok Tengah. Beberapa aktivitas yang harus dilaksanakan untuk mendukung program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain :

1. Melakukan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.
2. Melakukan penindakan atas gangguan trantibum dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
3. Melakukan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada
4. Melaksanakan sosialisasi terhadap kepatuhan masyarakat/pelaku usaha terhadap perda dan perkada yang memuat sanksi.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum Lainnya.
6. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas untuk menunjang tercapainya program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dari beberapa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa aktivitas yang belum maksimal dilaksanakan karena kurangnya dukungan anggaran. Pelaksanaan program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat berdampak pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten lombok Tengah. Adapun visi yang tertuang pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lombok Tengah adalah “Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (bersatu jaya). Sedangkan Misi pada RPJMD 2021-2026 program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum masuk dalam misi 1 yaitu “ Merawat akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat” dengan sasaran strategis Menjaga stabilitas keamanan di kawasan strategis dan wilayah penyangga. Sedangkan arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026 adalah Koordinasi dan kerjasama penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Perda dan Penanganan gangguan trantibum.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam

Dalam peningkatan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok

Tengah memiliki beberapa tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang di hadapi antara lain :

1. Di Kabupaten Lombok Tengah terdapat Bandara Internasional Lombok dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai wajah daerah sehingga harus tertib.
2. Pertumbuhan Pariwisata menciptakan pusat-pusat keramaian yang perlu diamankan dan ditertibkan.
3. Pertumbuhan investasi akan menambah pelaku usaha yang harus diawasi kepatuhan terhadap perda.

Adapun peluang yang mendukung pelayanan kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, antara lain :

1. Dukungan teknologi informasi atau media sosial lebih efektif.
2. Dukungan jumlah personil yang memadai.

2.3.5 Rekomendasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan perkembangan daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Ditambah lagi dengan adanya penetapan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, maka dianggap sangat perlu terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menumbuhkan kembangkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat dan unsur-unsur keamanan lainnya, melalui:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dalam rangka mengatasi pertumbuhan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang sering berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun dengan pemerintah;
2. Pemenuhan mutu layanan dasar SPM, antara lain :

- a. Diklat dasar untuk ASN Satpol PP, diklat PPNS, dan diangkatnya tenaga honorer menjadi ASN Satpol PP sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah Polisi Pamong Praja dimana menurut penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja Ideal di Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan kriteria:
 1. Kriteria Umum dengan Indikator Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah APBD, dan Rasio Belanja Aparatur.
 2. Kriteria Teknis dengan Indikator Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, Jumlah Peraturan Daerah, Jumlah Peraturan Kepala Daerah, Kondisi Geografis, Aspek Karakteristik Daerah, Tingkat potensi konflik sosial masyarakat dan Jumlah desa/kelurahan dan Jumlah Kecamatan. Setelah diadakan penghitungan dengan kriteria tersebut ditemukan jumlah Ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lombok Tengah yaitu paling sedikit 351 orang PNS dan paling banyak 450 orang PNS, namun keadaan sekarang anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah baru berjumlah 72 orang PNS dan 360 orang Pegawai Tidak Tetap, sehingga kami telah mengusulkan kepada Bupati Lombok Tengah untuk mengadakan formasi Calon ASN Tahun 2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 360 orang.
- b. Pemenuhan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan patroli di kawasan strategis , pembangunan gedung sekretariat PPNS, pembangunan ruang penyimpanan barang bukti, pengadaan sarana pendukung seperti senter, pakaian huku hara.
- c. Anggaran Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satpol PP
- d. Anggaran penyusunan Standar pelayanan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara

- e. Anggaran untuk warga negara yang memperoleh kerugian material (kerusakan akibat penegakan perda perkara, baik rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
 - f. Anggaran untuk warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda perkara dan ditindaklanjuti dengan di bawa ke rumah sakit apabila terkena cedera sedang/ berat).
3. Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah
 4. Pemberdayaan linmas dan Pamswakarsa/organisasi kemasyarakatan lainnya guna meningkatkan peran dan eksistensi dalam pelaksanaan tugas melalui kegiatan lomba sistem keamanan lingkungan, jambore satlinmas dan pos komando satlinmas.
 5. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang mendukung Penegakan Peraturan Daerah, Pengendalian Keamanan Lingkungan, maupun Sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat, sehingga menambah pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya;
 6. Penambahan anggaran guna menunjang kegiatan-kegiatan, seperti pengamanan event-event daerah dan pengawalan terhadap pejabat/ orang-orang penting.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satpol PP bertugas untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang di dalam pasal 255 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di bagi menjadi 3 (tiga) urusan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Sub urusan ketentraman ketertiban umum kewenangan pemerintah Kabupaten adalah :
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ Kota
 - b. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - c. Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota
2. Sub Urusan Bencana.
3. Sub Urusan Kebakaran.

Dari beberapa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa aktivitas yang belum maksimal dilaksanakan karena kurangnya dukungan anggaran. Pada Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum tertuang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga pada Ranwal Renja tahun 2025 perlu untuk menambah beberapa sub kegiatan baru yang menunjang pencapaian kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah. Pada Rancangan Awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung kinerja pelayanan sebesar Rp. 15.996.818.733 di mana terdapat 2 Program, 10 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Namun karena kurangnya pagu anggaran yang diberikan untuk mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan pada ranwal renja 2025 ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga pada renja 2025 ada 2 program, 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah anggaran Rp. 11.083.562.143. Adapun beberapa kebutuhan pendukung layanan kinerja Satpol PP Tahun 2025 yang tidak dapat terpenuhi, antara lain pengadaan sarana operasional kendaraan untuk Kepala Satpol PP, pengadaan kendaraan operasional bidang teknis di mana pada Satpol Kabupaten Lombok Tengah ada 3(tiga) bidang teknis yang tidak memiliki kendaraan operasional, penambahan kendaraan operasional patroli di mana kondisi kendaraan operasional patroli yang sudah ada kurang memadai dan sudah lebih dari 5 tahun, pemenuhan

peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, pembangunan gedung sekretariat PPNS dan ruang penyimpanan barang bukti.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.093.075.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11.556.610.367	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	153.100.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	122.850.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 dokumen	30.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	30.250.000	

			Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	30.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	30.250.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loteng	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	9.757.880.168	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loteng	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	9.757.880.168	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	9.729.766.402	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	9.729.766.402	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	6.039.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	6.039.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan	22.074.066	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan	22.074.066	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	171.170.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	251.170.040	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	18.150.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	55.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loteng	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	22.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loteng	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	22.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Loteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	16.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Loteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	16.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Loteng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	27.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Loteng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	27.500.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	57.020.040	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	57.020.040	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase validasi data aset OPD	100%	795.585.333	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase validasi data aset OPD	100%	875.143.866	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	450.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	495.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 unit	310.585.333	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 unit	341.643.866	
	Pengadaan Mebel	Loteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	35.000.000	Pengadaan Mebel	Loteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	38.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	48.765.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	53.641.500	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	38.765.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	42.641.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 laporan	11.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	450.840.720	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	495.924.792	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	116.210.820	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	127.831.902	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	290.629.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	319.692.890	
	Pemeliharaan Mebel	Loteng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	6.050.000	Pemeliharaan Mebel	Loteng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	6.655.000	

	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	10.450.000	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	11.495.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	27.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	30.250.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	72%	4.181.200.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	72%	4.534.282.500	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Loteng	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	3.781.450.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Loteng	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	4.100.277.500	
		Loteng	Angka Penyakit masyarakat	44 kasus			Loteng	Angka Penyakit masyarakat	44 kasus		
		Loteng	Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2030 orang			Loteng	Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2030 orang		
	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	132 kasus	1.673.400.000	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	132 kasus	1.840.740.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 kasus	93.750.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 kasus	117.187.500	

	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	90.500.000	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	95.500.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	803.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	883.300.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Loteng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	277 orang	275.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Loteng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	277 orang	280.000.000	
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	225.000.000	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	250.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 unit	395.800.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 unit	317.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Loteng	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	14 dokumen	75.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Loteng	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	14 dokumen	66.550.000	
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	150.000.000	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	250.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	399.750.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	434.005.000	

	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	130.050.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	143.055.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	110.200.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	115.500.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	159.500.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	175.450.000	
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Loteng	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 laporan	93.700.000	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Loteng	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	12 laporan	94.637.000	
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Loteng	Jumlah sarana prasarana penegakan peraturan daerah	2 unit	450.000.000	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Loteng	Jumlah sarana prasarana penegakan peraturan daerah	2 unit	454.500.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah PPNS yang di bina	6 orang	255.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah PPNS yang di bina	6 orang	258.000.000	
	Pembentukan sekretariat PPNS	Loteng	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	1 dokumen	150.000.000	Pembentukan sekretariat PPNS	Loteng	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	1 dokumen	151.500.000	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Loteng	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	105.000.000	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Loteng	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	106.500.000	

	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah dokumen pembentukan Satgas daerah di kabupaten/kota yang diberdayakan	2 dokumen	680.500.000	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah dokumen pembentukan Satgas daerah di kabupaten/kota yang diberdayakan	2 dokumen	687.350.000	
	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah satgas linmas di Kabupaten/Kota yang diberdayakan	1 Kegiatan	350.500.000	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah satgas linmas di Kabupaten/Kota yang diberdayakan	1 Kegiatan	354.050.000	
	Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	Loteng	Jumlah Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota yang diberdayakan	1 Kegiatan	330.000.000	Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	Loteng	Jumlah Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota yang diberdayakan	1 Kegiatan	333.300.000	
	JUMLAH				15.996.818.733					17.585.379.867	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Arah Kebijakan yang menjadi prioritas nasional adalah stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sedangkan arah kebijakan prioritas provinsi adalah Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Arah kebijakan prioritas daerah adalah Akhlakul karimah dan penanaman nilai budaya. Adapun program prioritas pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan program penunjang urusan pemerintah daerah yang dituangkan dalam renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026:

1. Penataan administrasi.
2. Pengadaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peningkatan pencapaian kinerja.
4. Operasi penegakan Perda.
5. Pencegahan gangguan trantibum melalui kegiatan cegah dini deteksi dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.
6. Pengamanan terpadu kawasan pariwisata.
7. Koordinasi peyelenggaraan ketertiban umum.
8. Penyadaran tentang penyakit masyarakat.
9. Perlindungan masyarakat.
10. Pemenuhan mutu layanan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan untuk terwujudnya Visi Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan tujuan

yang hendak dicapai oleh RENJA sebagai fokus kegiatan yang mencerminkan kebijakan mengenai cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- 1) Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan linmas
- 2) Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pelayanan publik.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 adalah Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator : Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dan persentase penurunan penyakit masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tujuannya yaitu:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP OPD
- 2. Tegaknya perda dan perkara dengan indikator persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara
- 3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum dengan indikator persentase penanganan gangguan trantibum yang melibatkan masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah Tahun 2025
Kabupaten Lombok Tengah

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator sasaran	Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya Ketentraman , Ketertiban, dan Linmas	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk	18	17
			Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2%	2,2%

		trantibum			
			Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10%	10%
			Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan Masyarakat	33 %	34 %
2	Meningkatnya kapasitas pemda dalam pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sekaligus penjabarannya tertampung dalam berbagai program kegiatan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 1.8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan:
- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.5. Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.1. Pengadaan mebel
- 4.2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 6.1. Penyediaan Jassa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kenjaraan Dinas Jabatan
- 6.2. Penyediaan Jassa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 7.1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 7.2. Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 7.3. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 7.4. Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
- 7.5. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 7.6. Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- 7.7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

8. Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan :

- 8.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 8.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 8.3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

9. Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 9.1. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yaitu visi “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (bersatu jaya) dan misi 1 “ Merawat ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten

Lombok Tengah dengan tujuan 1 “Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dengan sasaran 1.1. “Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat maka ditetapkan beberapa program pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah diantaranya Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase perda dan perkara yang ditegakkan yang menjadi tanggung jawab dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 sebagai pertimbangan pengambilan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah antara lain, koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, Penegakan perda dan perkara dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah juga untuk mencapai indikator layanan dan mutu layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan jenis layanan yang harus dipenuhi yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara. Sedangkan mutu layanan yang harus terpenuhi untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum adalah :

1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. Gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c. Perlengkapan operasional) ;
2. Standar operasional prosedur Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan satlinmas (jumlah dan kualitas personil/ SDM);
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada;
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat pelanggaran perda perkara, rusak ringan, rusak sedang rusak berat);
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda perkara dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang atau berat.

Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada rencana kerja tahun 2025 akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal hasil tembakau yang anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Adapun program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2025 terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan rencana berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu di 12 kecamatan yang ada yaitu kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dan kegiatan Penegakan peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/Walikota. Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota rencana akan dilaksanakan di luar daerah untuk mengikuti diklat PPNS.

Jumlah anggaran pada ranhir renja 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah adalah Rp. 11.083.562.143 yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 10.083.562.143 dan DBHCHT sebesar Rp. 1.000.000.000.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

Matriks Renja Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE					Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1					2	3		4	5	6	7	8	9
x					Non Urusan								
x	xx				Non Bidang Urusan								
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.172.119.708				12.014.348.002
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai		100%	105.820.307			100%	171.410.000
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	3 dokumen	32.021.185	APBD II		2 dokumen	25.000.000
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Lombok Tengah	1 dokumen	2.477.960	APBD II		1 dokumen	19.965.000
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Lombok Tengah	1 dokumen	2.477.960	APBD II		1 dokumen	19.965.000
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Lombok Tengah	1 dokumen	2.485.960	APBD II		1 dokumen	19.965.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Lombok Tengah	1 dokumen	2.485.960	APBD II		1 dokumen	19.965.000

				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lombok Tengah	13 laporan	10.701.977	APBD II		13 laporan	33.275.000
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lombok Tengah	12 laporan	13.019.305	APBD II		12 laporan	33.275.000
				010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lombok Tengah	2 berita acara	40.150.000	APBD II		2 laporan	33.275.000
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD		100%	7.145.094.747			100%	10.938.665.670
				01	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lombok Tengah	966 orang/bulan	7.128.357.183	APBD II		966 orang/bulan	10.907.022.000
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lombok Tengah	1 laporan	1.631.416	APBD II		1 laporan	6.643.670
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Lombok Tengah	12 laporan	15.106.148	APBD II		12 laporan	25.000.000
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP		100%	134.271.118			100%	209.022.044
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	1 paket	3.860.558	APBD II		1 paket	20.000.000
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	1 paket	17.064.254	APBD II		1 paket	55.000.000
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0	0	0		0	0
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	13 paket	40.230.000	APBD II		13 paket	60.500.000
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	I		0	0
				06	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0	0			0	0

				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lombok Tengah	30 laporan	63.180.000	APBD II		30 laporan	62.722.000
				011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Lombok Tengah	1 Dokumen	9.936.306	APBD II		1 Dokumen	10.800.000
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase validasi data aset OPD		100%	49.549.375			100%	38.500.000
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0			0	0
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0			0	0
				03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lombok Tengah	1 paket	49.549.375	APBD II		1 paket	38.500.000
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu		100%	1.203.003.840			100%	75.000.000
				02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lombok Tengah	12 laporan	57.963.840	APBD II		12 laporan	75.000.000
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0			0	0
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lombok Tengah	12 laporan	1.145.040.000	APBD II		12 laporan	
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daaerah Kondisi Baik		100%	534.380.321			100%	581.750.288
				01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lombok Tengah	41 unit	114.841.520	APBD II		41 unit	140.615.092
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Lombok Tengah	8 unit	369.668.120	APBD II		8 unit	395.215.696
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0			0	0
				06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lombok Tengah	20 unit	14.800.000	APBD II		20 unit	12.644.500
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Lombok Tengah	2 unit	35070681	APBD II		2 unit	33.275.000

1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan		86 %	1.911.442.435			100 %	4.721.458.500
			2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		288 kasus	658.901.010			288 kasus	3.940.403.250
						Angka Penyakit masyarakat		43 kasus				42 kasus	
						Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum		2120 orang				2210 orang	
				03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		0	0	0		0	0
				04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12 dokumen	152.930.756	APBD II		12 dokumen	873.421.875
				05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		430 orang	86.000.000	APBD II		430 orang	332.750.000
				06	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		0	0	0		0	0
				08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		11 dokumen	7.765.120	APBD II		14 dokumen	73.155.000
				15	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		12 laporan	376.021.854	APBD II		12 laporan	1.802.592.250
				16	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		12 laporan	21.300.000	APBD II		12 laporan	146.484.375
				17	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		1 laporan	6.847.958	APBD II		1 laporan	275.000.000

				18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		10 unit	8.035.322	APBD II		15 unit	404.000.000
			2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada		100%	1.205.533.425			100%	464.040.500
				10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 laporan	466.116.343	APBD II		12 laporan	167.040.500
				11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Sesuai SOP		12 laporan	656.217.082	APBD II		12 laporan	181.500.000
				12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 laporan	83.200.000	APBD II		12 laporan	115.500.000
				04	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		0	0			0	0
				05	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Jumlah sarana prasarana penegakan peraturan daerah		0	0			0	0
			2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang di bina		1 orang	47.008.000	APBD II		1 orang	51.708.800
				06	Pembentukan sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS		0	0	0		0	0
				07	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		1 orang	47.008.000	APBD II		1 orang	51.708.800
			2.04		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembentukan Satgas daerah di kabupaten/kota yang diberdayakan		0	0			0	0
				08	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah satgas linmas di Kabupaten/Kota yang diberdayakan		0	0			0	0
				09	Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota	Jumlah Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota yang diberdayakan		0	0			0	0
					JUMLAH				11.083.562.143				16.470.500.552

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- 2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
- 3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
- 4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
- 5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:

Misi 1	Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat
Tujuan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban, dan Linmas
Sasaran	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum
Indikator kinerja dalam Renstra	1. Tingkat Gangguan Trantibum per 100.000 orang penduduk 2. Persentase penurunan penyakit masyarakat 3. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 4. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat
Program 1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator	Persentase perda perkara yang ditegakkan

Program 1	
Program 2	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator	Nilai Sakip OPD
Program 2	

4.1 Program Dan Kegiatan

Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut sekaligus penjabarannya tertampung dalam berbagai program kegiatan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 2.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 2.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

11. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- 8.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 8.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 6.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.3. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 6.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6.6. Penyediaan Bahan/Material
 - 6.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 10.1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 10.2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 10.3. Pengadaan mebel
 - 10.4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 10.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 10.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 15.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 15.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 15.3. Pemeliharaan mebel
 - 15.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 15.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- 16.1. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota

16.2.Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

16.3.Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

16.4.Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

16.5.Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

16.6.Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

16.7.Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

16.8.Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

16.9.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

17. Kegiatan :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan :

17.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

17.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

17.3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

17.4. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- 17.5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti

18. Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 18.1. Pembentukan sekretariat PPNS

- 18.2. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah

19. Kegiatan : Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 19.1. Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota

- 19.2. Pemberdayaan Satgas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/
Kota

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKAB. LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode Ren stra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Targ et RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelo mpok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penanggun g Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Tar get	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Satuan Polisi Pamong Praja						11.083.562.143,00					16.470.500.552,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.083.562.143,00							16.470.500.552,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.083.562.143,00							16.470.500.552,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			B Predikat	9.172.119.708,00						-	12.014.348.002,00	

	1	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai Persentase IKU OPD yang tercapai	-			100 % 100 Persen	105.820.307,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	171.410.000,00	
	1	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen Dokumen	32.021.185,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASIM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.477.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASIM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		19.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.485.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASIM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan	-		19.965.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					13 Lapora n	10.701.97 7,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penye lupan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-		33.275.00 0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	
	1	0 5	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12 Lapora n	13.019.30 5,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n	-		33.275.00 0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	

														Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah					
	1	0	0	2.	00	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		5	1	01	10		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	40.150.00 0,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	PD-5 Peningka tan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-		0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA

	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	-			100 %	7.145.094.747,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-	-	10.938.665.670,00	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				966 Orang/bulan	7.128.357.183,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memperkuat Pencegahan dan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan	-		10.907.022.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

													Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	beragama dan pemajuan kebudayaan daerah						
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		5	1	02	05		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	1.631.416,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		6.643.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		5	1	02	07															

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	15.106.148,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	-			100 %	134.271.18,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan	-	-	209.022.044,00	

																n kebuday aan daerah				
	1	0 5	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.860.558, 00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	PD-5 Peningka tan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-		20.000.00 0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	
	1	0 5	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.064.25 4,00	Kab. Lomb ok Tenga h,	DANA ALOK ASI UMU M	-	Pembang unan Tata Kelola Pemerint	-		55.000.00 0,00	SATUA N POLISI PAMO NG	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

							Berbasis Elektronik pada SKPD						Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	(DAU)		ahan Daerah Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah					PRAJA
	1	0 5	0 1	2. 07		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentase validasi data aset OPD Persentase Validasi data aset OPD	-			100 0 100 persen	49.549.37 5,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-	-	38.500.00 0,00		
	1	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel															

		5	1	07	05															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	49.549.375,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		38.500.000,00	SATUAN POLSI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	-			100 % 100 persen	1.203.003.840,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama	-	-	75.000.000,00	

														a dan pemajuan kebudayaan daerah					
	1	0 5	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57.963.84 0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		75.000.00 0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0 5	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	1.145.040. 000,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	PD-5 Peningka tan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-		0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA
	1	0	0	2.		Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Barang Milik Daaerah Kondisi Baik	-			100 %	534.380.3 21,00			-	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n	-	-	581.750.2 88,00	

															kebuday aan daerah				
	1	0 5	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	114.841.520,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		140.615.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0 5	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan				8 Unit	369.668.120,00	Kab. Lombok Tengah,	DANA ALOK ASI UMUM	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintah	-		395.215.696,00	SATUAN POLISI PAMONG

						Pajak dan Perizinannya						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)		ahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah				PRAJA
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial	-		12.644.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

															kemasya rakatan				
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	5	1	09	09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	35.070.681,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) Meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan daerah	-		33.275.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase Perda yang ditegakkan	-			86 %	1.911.442.435,00					-	4.456.152.550,00	

						KETERTIBA N UMUM														
	1	0	0	2.		Penangan an Gangguan Ketentera man dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Angka Penyakit masyarakat Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	-			288 Kasus 43 Kasus 2120 orang	658.901.0 10,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-	-	3.940.403. 250,00	
	1	0	0	2.	00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
	5	2	01	04			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokum en	152.930.7 56,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk	-		873.421.8 75,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA

[illegible]

		5	2	01	08																
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan					11 Dokum en	7.765.120, 00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa n beragam a dan pemajua n kebuday aan daerah	-		73.155.00 0,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA
	1	0 5	0 2	2. 01	00 15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan					12 lapora n	376.021.8 54,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) Meningk atkan kehidupa	-		1.802.592. 000,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA

							Pengawasan								han dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	n beragam a dan pemajuan kebudayaan daerah				
	1	0	0	2.	00	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	21.300.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		146.484.375,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah														
	5	2	01	17																

						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					1 Lapora n	6.847.958,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan Korupsi, Narkoba , Judi dan Penyelu dupan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) 9. Peningka tan kualitas pelayana n publik dan menjaga stabilitas sosial kemasya rakatan	-		275.000.000,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia					10 Unit	8.035.322,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) 9. Peningka tan kualitas	-		404.000.000,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	1	0	0	2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	-			100 %	1.205.533.425,00			-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-	-	464.040.500,00	
	1	0	0	2.	00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	466.116.343,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas	-		167.040.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan					
	1020200	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	656.217.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5) 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan	-		181.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1020200	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Lapora n	83.200.00 0,00	Kab. Lomb ok Tenga h, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Pembang unan Tata Kelola Pemerint ahan Daerah (PD-5) 9. Peningka tan kualitas pelayana n publik dan menjaga stabilitas sosial kemasya rakatan	-		115.500.0 00,00	SATUA N POLISI PAMO NG PRAJA	
	1	0 5	0 2	2. 03		Pembinaa n Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	Jumlah PPNS yang dibina	-			6 orang	47.008.00 0,00			Memper kuat Reforma si Politik, Hukum, dan Birokrasi , serta Memper kuat Pencega han dan Pembera ntasan	Transfor masi tata kelola pemerint ahan dan birokrasi	PNS	-	51.708.80 0,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena kurangnya pagu anggaran yang diberikan, antara lain pengadaan sarana prasarana trantibum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja BAB V Pasal 21 tentang kewajiban Pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal Satuan polisi Pamong Praja dan pembinaan teknis operasional. Sarana prasarana minimal yang dimaksud antara lain, gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional. Adapun Sarana prasarana minimal yang belum tersedia diantaranya kendaraan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, kendaraan operasional masing-masing bidang, perlunya pengadaan kendaraan patroli karena kondisi kendaraan patroli yang sudah ada kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, penyediaan gedung Sekretariat PPNS dan ruang penyimpanan barang bukti, perlengkapan perorangan pakaian dinas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan perlengkapan operasional lainnya. Sedangkan untuk pembinaan teknis operasional yang dimaksud adalah pembinaan etika profesi, koordinasi satpol PP, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, manajemen penegakan perda dan perkara, peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan harus adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana minimal Satuan polisi Pamong Praja dan pembinaan teknis operasional Satpol PP. Sedangkan untuk Kepala Satpol PP beserta jajaran terus melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan maksimal melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menjaga trantibum serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk ke depannya satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah akan terus berkoordinasi dengan TAPD untuk dapat terpenuhinya penyediaan sarana prasarana minimal satpol PP dan pembinaan teknis operasional Satpol PP. Juga akan berkoordinasi dengan Satpol

PP Provinsi NTB maupun dengan Direktorat Satpol PP Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI terkait tugas pokok dan fungsi serta pemenuhan kebutuhan Satpol PP.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2025.

Dan untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah dan Kepala SKPD akan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur NTB.

Praya , Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



ZAENAL MUSTAKIM, AP.M.Si.

Pembina Utama Muda(IV/c)

NIP. 19741231 199412 1 001